



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke – 8
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Kamis, 2 Juni 2022
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 13.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI dan secara Virtual Zoom Cloud Meeting dari tempat masing-masing
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Mei 2022; 2. Membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L TA 2023 masing-masing Unit Eselon I.
Ketua Rapat	: H. Syaifullah Tamliha, S.Pi.,M.S.
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: Orang dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Sekjen, Irjen, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi pada hari ini adalah Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan bulan Mei 2022 dan Membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L TA 2023 masing-masing Unit Eselon I..
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pejabat Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2022, Komisi V DPR RI meminta Sekjen; Irjen; Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk melakukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan Tahun Anggaran 2022.
2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Sekjen; Irjen; Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran untuk Eselon I dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023, sebagai Berikut:

Dalam Ribu Rupiah

NO.	UNIT ORGANISASI ESELON I	PAGU KEBUTUHAN TA 2023	PAGU INDIKATIF TA 2023	SELISIH/ BACKLOG
		A	B	A-B
1.	Sekretariat Jenderal	229.500.000	225.000.000	4.500.000
2.	Inspektorat Jenderal	54.750.000	51.750.000	3.000.000
3.	BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.860.891.224	1.792.892.120	67.999.104
4.	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	211.265.039	134.786.762	76.478.277

3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Sekjen; Irjen; Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA K/L masing-masing Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2023, sesuai dengan saran dan pendapat serta usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2023.

4. Komisi V DPR RI meminta..../Hal.3

4. Komisi V DPR RI meminta Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar:
- melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga pendamping desa;
 - dalam proses rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional memprioritaskan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten/kota setempat.
 - melakukan evaluasi terhadap besaran anggaran Pendampingan Desa demi mendukung program/kegiatan di sektor prioritas lainnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

Jakarta, 2 Juni 2022

KETUA RAPAT,



SYAIFULLAH TAMLIHA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,



TAUFIK MADJID

Pit. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,



EKO SRI HARYANTO

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DDTT
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,



LUTHFIYAH NURLAELA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,



IVANOVICH AGUSTA